160

Kelompok Sipil dan Ek

KETIKA di suatu tempat sekelompok orang dengan clurit dan pedang menyatakan siap menyerang seraya meneriakkan Allahu Akbar, lalu di suatu tempat berbeda sekelompok orang yang lain dengan clurit dan pedang menyatakan siap menghadapi serangan tersebut seraya juga meneriakkan Allahu Akbar, adakah yang bisa menjelaskan bahwa semangat ini adalah demi *rahmatan lil-alamin* atau rahmat bagi sekalian alam? Adakah yang bisa menjelaskan bahwa itu adalah semangat kebenaran? Jika para malaikat harus mencatat, bagaimana mesti mengisi kolom kebenaran dan kebatilan di dalam laporannya kepada Allahu SWT? Maka masuk akal pula dalam peristiwa seperti itu, di mana berlangsung tantang-menantang antara kelompok sipil berbasis dan beratribut agama, Front Pembela Islam (FPI) dengan kelompok semacam Banser dan Ansor, polisi yang tentu saja bukan malaikat, untuk sesaat sempat bingung bagaimana harus bertindak dengan cepat.

Potensi konflik horisontal antarkelompok sipil berbasis agama yang meruncing belakangan ini, secara kronologi harus kita dipahami sebagai peringatan atas ketidakterampilan kita dalam mengelola demokrasi serta mengelola agama dan keyakinan, di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Peristiwa bentrokan di Monas antara massa beratribut FPI dengan massa yang menamakan diri Aliansi untuk Kebebasan dan Berkeyakinan (AKBB), pada Minggu 1 Juni 2008, bukanlah sumber api konflik, melainkan hanya satu percikan di antara percikan-percikan sebelumnya, di mana kekerasan-kekerasan sejenis sudah berulangkali terjadi.

Penangkapan atas mereka yang terlibat kasus Monas, penahanan Ketua FPI, atau perlakuan atas Komandan Laskar Pembela Islam Munarwan yang seperti tersangka teroris, berangkali adalah langkah hukum yang memang harus diambil. Namun langkah itu akan tidak cukup untuk menunjukkan bahwa kita menjadi terampil dalam mengelola demokrasi serta mengelola agama dan keyakinan yang menjadi sumber permasalahan.

Lebih menyedihkan lagi, kalau hiruk-pikuk ancam-mengancam antarkelompok sipil ini, merupakan produk dari sebuah rekayasa politik, misalnya agar perhatian masyarakat beralih dari prihatin dan khawatir atas kenaikan harga BBM yang berimplikasi pada kesulitan hidup yang makin parah, menjadi lebih prihatin dan khawatir karena dibayangi tragedi berdarah-darah perang saudara atau apa pun istilahnya. Jika ini rekayasa politik, maka rekayasa itu untuk sementara agak berhasil, terlihat masyarakat yang tidak lagi terfokus dalam memikirkan nasib masa depannya sehubungan dengan harga-harga yang melambung tinggi, melainkan sudah terpecah-belah pada semangat bagaimana kelompok yang satu menghabisi kelompok yang lain. Namun dalam proses perjalanan sebuah bangsa, jika kondisi semacam ini yang diciptakan, jelas merupakan sebuah dekadensi dari semangat moral universal, termasuk moral-moral yang diusung agama maupun ideologi Pancasila.

Demokrasi mempercayai bahwa civil society adalah pilar utama dalam mencapai tujuan menuju masyarakat yang bermartabat, adil, dan sejahtera. Civil sociaty ditandai lewat organisasi-organisasi kemasyarakatan dengan segenap ekspresinya. Undang-undang menjamin kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi dan kebebasan

menyampaikan pendapat. Agar tidak kebablasan, kebebasan berdemokrasi juga diatur oleh undang-undang.

Keberadaan FPI, AKBB, Banser, Ansor, dan ratusan atau mungkin ribuan kelompok sipil lainnya, merupakan konsekuensi dari demokrasi yang tumbuh di Indonesia. Apa pun yang menjadi ideologi serta wilayah pergerakan mereka, diperbolehkan oleh demokrasi, selain barangkali jika ideologi dan gerakan itu bersifat antidemokrasi. Partai Komunis misalnya, masih dinyatakan dilarang, karena dianggap musuh demokrasi. Beberapa organisasi dinyatakan terlarang, barangkali karena mengusung ideologi yang antidemokrasi.

Bersandar pada semangat demokrasi pula, yang di dalamnya termasuk menjunjung hak asasi, Pemerintah tidak bisa gegabah untuk begitu saja melarang Ahmadiyah baik sebagai organisasi maupun sebagai sebuah keyakinan, meskipun ada rekomendasi dari berbagai kelompok keagamaan yang juga bagian dari kelompok sipil, agar Ahmadiyah dinyatakan terlarang. Dari sinilah pangkal-muasal datangnya ujian berat dalam hal keterampilan kita mengelola demokrasi, yang buntutnya menimbulkan percikan api permusuhan dalam masyarakat.

Persoalan akan sedikit lebih mudah, manakala Ahmadiyah bukanlah Islam melainkan agama atau keyakinan tersendiri. Demokrasi akan menjamin keberadaannya. Namun ketika Ahmadiyah adalah bagian dari agama dan keyakinan Islam, maka keyakinan yang dikembangkan oleh Ahmadiyah telah mengusik kelompok-kelompok Islam yang ada, lantaran menyentuh masalah syariah atau hukum dasar dari sebuah keyakinan beragama. Ketika demokrasi tidak bisa secara tegas mengatasi masalah seperti ini, yang muncul kemudian adalah ekspresi yang cenderung radikal dari kelompok sipil berbasis agama yang merasa syariah keyakinannya terusik. FPI dari awal memang sudah memperlihatkan karakternya yang radikal. Dan FPI yang merasa terusik

spresi Kekerasan

Oleh Akhlis Suryapati, Seniman – Budayawan

keyakinannya, menemukan lahan radikalismenya, tatkala AKBB melakukan pembelaan atas hak hidup dan keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Terjadilah peristiwa kekerasan di Monas.

Kekerasan adalah musuh kita bersama. Tetapi radikalisme adalah sebuah kebutuhan dalam perjuangan, pergerakan, bahkan juga dalam pembangunan. Ini dua ekspresi yang berbeda. Dalam kesepakatan kita untuk tidak membiarkan aksi-aksi kekerasan, semua pihak mestinya lebih mempercayai proses hukum yang independen, dalam hal ini hukum negara. Jika hukum negara bisa diterapkan dalam mekanisme yang baku, kalau toh terjadi peristiwa seperti di Monas, di mana aparat dan pemerintah bisa bertindak cepat dan sigap, maka polarisasi potensi konflik horisontal seperti sekarang ini akan bisa dicegah.

Persoalannya adalah, hukum kita sebagai produk politik, dalam implementasinya masih sangat mempertimbangkan sisi-sisi politik. Mestinya ketika sudah menjadi sebuah hukum, maka pelaksanaannya harus independen, tanpa lagi menyertakan kepentingan-kepentingan politik di dalamnya. Kurangnya kita terampil mengelola demokrasi yang berlandaskan hukum, adalah karena keterikatan pada kepentingan politik yang masih sangat kuat.

Dalam hal sekarang berkembang tekanan dari sejumlah kelompok untuk membubarkan FPI, pemerintah ada baiknya segera menempatkan segala sesuatunya di atas landasan hukum yang berlaku. Jika FPI adalah kelompok sipil yang keberadaannya dijamin oleh demokrasi, pembubarannya hanyalah akan menyuburkan radikalisme tanpa kontrol. Yang perlu dilarang pada FPI, dan juga seluruh kelompok-kelompok sipil, adalah aksi-aksi kekerasannya. Instrumen untuk pelarangan itu adalah hukum negara. Begitu pun terhadap Ahmadiyah atau pun organisasi-organisasi lainnya, hukum negaralah yang lebih menentukan, bukannya rekomendasi dari kelompok-kelompok tertentu atau tekanan-tekanan dari pihak tertentu.

Fenomena potensi konflik horizontal belakangan ini, selain ujian berat bagi pengelolaan demokrasi, juga ujian berat bagi pengelolaan agama di Indonesia, khususnya agama Islam sebagai mayoritas. Berkembangnya Ahmadiyah adalah persoalan pengelolaan agama. Dari sudut keagamaan, apakah keyakinan seperti diusung Ahmadiyah menyimpang dari Islam ataukah masih bisa dipandang sebagai bagian dari keragaman Islam, menjadi tugas kaum agamawan yang berkepentingan untuk mendiskusikan dan menyikapi secara bijaksana di dalam koridor-koridor keislaman yang *rahmatan-lil alamin*.

Islam menyatakan sebagai agama *rahmatan-lil alamin*, yang berarti sangat memberi konsentrasi pada kehidupan bermasyarakat. Maka para tokoh dan pemeluknya sangat dituntut untuk memahami kondisi dan situasi sosial masyarakat yang meliputi wilayah seluruh Indonesia dengan jumlahnya sekitar 250 juta jiwa ini. Rekomendasi bahwa Ahmadiyah adalah sesat, terlarang, atau menyimpang dari Islam, bisa menjadi provokasi menciptakan radikalisme dalam kelompok sipil berbasis agama. Namun rekomendasi bahwa Ahmadiyah adalah agama atau keyakinan tersendiri, kiranya bisa lebih disosialisasikan secara bijaksana ke masyarakat, untuk kemudian diadopsi oleh negara dalam mengambil kebijakannya atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ahmadiyah berdasarkan hukum yang berlaku.

Menjadi ironis, hanya karena adanya Ahmadiyah—baik sebagai bagian dari Islam maupun di luar Islam—sekarang ini antarkelompok sipil berbasis agama Islam justru berada dalam eskalasi potensi konflik horizontal yang kontraproduktif. Lebih ironis lagi, jika Islam cukup bisa dipecah-belah hanya oleh sebuah peristiwa di Monas. Ada baiknya ironi-ironi semacam ini menjadi perenungan yang member pelajaran bagi kalangan agama Islam.

Ada pun mengenai FPI, Banser, Ansor, dan kelompok-kelompok sipil lainnya, dengan basis ideologi apa pun, koridornya adalah hukum negara. Mencuatnya ekspresi kekerasan sebagai karakter dari sebagian kelompok-kelompok sipil itu, semata-mata karena masalah penegakan hukum. Kita sudah memiliki banyak undang-undang untuk mencegah terjadinya praktek-praktek kekerasan, lengkap dengan hukum acaranya, sehingga ketika sebuah praktek kekerasan terjadi maka prosedur penindakan yang harus dilakukan oleh aparat sudah sangat jelas. Tidak perlu menunggu masyarakat beraksi dengan ekspresi kekerasan atas aksi sebuah tindak kekerasan

Mengelola demokrasi dan agama untuk negara dengan penduduk sekitar 250 juta jiwa, barangkali tidak begitu rumit manakala telah tercipta kondisi kesetaraan sosial, pendidikan, ekonomi, dan pengetahuan. Persoalannya adalah, di Indonesia yang namanya kesetaraan itu masih sangat jauh dari harapan. Di mana-mana yang terlihat adalah kesenjangan dan ketimpangan, meliputi berbagai hal. Kesenjangan dan ketimpangan inilah yang menjadi sumber dari mudahnya demokrasi maupun persoalan agama menjelma sebagai benih memerciknya konflik. Peristiwa di Monas yang kemudian merembet dalam bentuk aksi-aksi berekspresi kekerasan di berbagai daerah adalah contoh paling nyata atas semua itu.

***

Kirimkan artikel yang lucu, ringan dan menarik ke alamat redaksi majalah Jagratara atau ke Email: ariefpol@yahoo.com

TAWA ADALAH OBAT PENENANG TANPA EFEK SAMPING

MELANGGAR"

SIGIT mengajak Budi mencoba mobil barunya.

"Awas, lampu merah. Stop!" teriak Budi panik.

"Tenang saja ..., iparku sudah dua tahun tidak memedulikan lampu merah dan nyatanya tidak terjadi apa-apa."

Di perempatan kedua, lampu merah menyala. Lagi-lagi, Sigit dengan tenang melanggar lampu merah. "Sudah kukatakan, iparku sudah dua tahun selamat-selamat saja melewati perempatan yang lampunya sedang merah.

Tenanglah!!"

Tiba di perempatan ketiga, lampu hijau menyala. Sigit menghentikan mobilnya.

"Jalan terus! Lampu hijau!" teriak Budi tegang.

"Tenang, bila aku jalan terus, kau bisa bayangkan apa kejadiannya bila tiba-tiba iparku muncul dari kiri atau kanan kita?"

MENGHORMATI SENIOR

POLANTAS sedang menangani tabrakan 2 mobil,yang datang dari arah jalan Jendral Sudirman dan arah jalan Jendral Gatot Subroto. Dia bingung mobil mana yang benar dan salah, akhirnya diputuskan mobil dari arah Gatot Subroto yang salah. Pemilik mobil protes dan tanya:

Supir : Wah Pak Polisi pilih kasih, kok saya yang disalahkan ?

Polisi : Saya tidak pilih kasih, saya cuma menghormati senior.

Supir : Apa maksudnya menghormati senior, pak....?.

Polisi : Jendral Sudriman,itu seniornya Jendral Gatot Subroto

EMANSIPASI

Seorang preman ditangkap polisi karena menyamar jadi Polisi:

Polisi : Kamu jadi Polisi gadungan ya.

Preman : Engga, pak. Cuma emansipasi...

Polisi : Hah...emansipasi apaan katamu..?.

Preman : Polisi reserse suka menyamar menjadi preman, kenapa preman tidak boleh menyamar jadi polisi.....

Polisi :.....**&&^^$$##@!!#@$.....

CARANYA

SEORANG suami datang ke kantor Polisi,sebagai saksi kasus pencurian dirumahnya. Selesai di proses berita acara, dia tanya sama Polisi.

Suami : Boleh saya ketemu sama pencurinya, pak..?.

Polisi : Tidak boleh, nanti kamu emosi, lalu pencuri itu kamu pukuli.

Suami : Tidak pak. Saya cuma pengen tanya aja.

Polisi : Kamu mau tanya apa ??

Suami : Saya cuma mau tanya, bagaimana caranya dia bisa masuk kerumah, tapi istriku tidak tahu. Aku sudah mencobanya bertahun tahun, tetapi selalu saja aku gagal.....

VEGETARIAN

DALAM sebuah persidangan kasus pemerkosaan. Sang Hakim Ketua bertanya kepada korban.

Hakim : "Apakah benar kamu telah diperkosa?"

Korban : "Benar pak Hakim."

Hakim : "Bagaimana kamu diperkosa?"

Korban : "Saya dipaksa untuk melakukan oral sex."

Hakim : "Lalu kenapa tidak kamu gigit saja kelamin si pelaku?"

Korban : "Maaf pak Hakim, saya vegetarian."

Hakim : !@#$%..

RAMALAN

SEORANG istri pergi ke peramal, dia bertanya soal suami.

Istri : Bagaimana masa depan perkawinan kami Pak..?.

Peramal : Menurut ramalan saya, anda akan dapat musibah.

Istri : Musibah..?.

Peramal : Suami anda akan mati dengan mengenaskan.

Istri : Tapi..tapi...

Peramal : Tapi apa..?.

Istri : Tapi saya bisa lolos dari, dakwaan hukum apa enggak Pak..?.

Peramal:.....&&^^%$#$#@!!#.....